

LAPORAN KINERJA 2018

Bidang Kelautan & Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Jl. Tgk. Malem No. 07 Kuta Alam
Banda Aceh

Phone : 0651 22951
Website : dkp@acehprov.go.id



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2018. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Gubernur Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai bentuk peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Seluruh kebijakan yang dilaksanakan tahun 2018 merupakan penjabaran dari 2 misi gubernur Aceh, yang dalam sistem pengelolaan kinerjanya ditetapkan dalam 5 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja tahun 2018 termasuk capaian target beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2018, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjadi modal utama peningkatan kinerja. Disamping itu, kerja keras jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan serta dukungan lintas sektor, instansi

terkait lainnya, seluruh pemangku kepentingan akan menjadikan sinergi pencapaian target pada tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih

Banda Aceh, Februari 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh



CUT YUSMINAR, A.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	01
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Maksud dan Tujuan	02
1.3. Tugas dan Fungsi DKP Aceh	02
1.4. Sumber Daya Manusia DKP Aceh	04
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh	07
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	09
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022	11
2.2. Indikator Kinerja Utama	17
2.3. Perjanjian Kinerja	17
2.4. Program Instansi	18
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	22
3.1. Capaian Kinerja	22
3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja	24
3.3. Kinerja Keuangan	39

BAB 4. PENUTUP	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

1.1. Rincian Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Berdasarkan Jabatan -----	05
1.2. Rincian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan -----	05
1.3. Rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan -----	06
2.1. Visi, Misi, Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan -----	15
2.2. Penetapan Kinerja DKP Aceh Tahun 2018 -----	18
3.1. Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2018 -----	22
3.2. Kinerja rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2018 -----	25
3.3. Kinerja rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) tahun 2018 -----	27
3.4. Capaian angka konsumsi ikan tahun 2018 -----	28
3.5. Capaian Pertumbuhan PDRB sub Perikanan tahun 2018 -----	30
3.6. Capaian produksi perikanan tahun 2018 -----	31
3.7. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2018 -----	32
3.8. Capaian produksi perikanan budidaya tahun 2018 -----	33
3.9. Capaian produksi garam tahun 2018 -----	34
3.10. Capaian nilai ekspor perikanan tahun 2018 -----	35
3.11. Capaian luas kawasan konservasi perairan tahun 2018 -----	37
3.12. Persentase tangkapan ikan terhadap MSY Aceh tahun 2016-2018 -----	37
3.13. Rasio luas kawasan konservasi terhadap perairan teritorial 2017-2018 -----	38
3.14. Pagu dan realisasi anggaran DKP Aceh tahun 2016 – 2018 -----	39
3.15. Pagu dan realisasi anggaran DKP Aceh per program tahun 2018 -----	40

DAFTAR GAMBAR

3.1. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama tahun 2016-2018	----- 26
3.2. Produksi perikanan tahun 2016-2018 (ton)	----- 31

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	44
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2018 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2018 merupakan lanjutan pelaksanaan 2 misi pembangunan dalam Rencana Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, yakni mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Rencana Strategis (RNSTRA) tahun 2017-2022 dengan 5 Sasaran Strategis (SS) dan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Dari 11 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2018, terdapat 9 IKU (81,82%) yang pencapaiannya melebihi target, 2 IKU (18,18%) yang belum dapat mencapai target.
2. IKU yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan (capaian > 100%) adalah: 1). Nilai tukar nelayan, 2). Konsumsi ikan, 3). Produksi perikanan tangkap, 4). Produksi perikanan budidaya, 5). Produksi garam, 6). Nilai ekspor perikanan, 7). Luas kawasan konservasi perairan, 8). Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, 9). Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial.
3. 2 IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian <100%) adalah: 1). Nilai tukar pembudidaya ikan, 2). Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan.

Kinerja keuangan DKP Aceh tahun 2018 dilaksanakan melalui pelaksanaan 8 program dalam APBA DKP Aceh Tahun 2018. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DPA terbit adalah sebesar Rp 332,1 milyar, dari pagu alokasi anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2018 dapat direalisasi sebesar 62,67%. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan DKP Aceh

tahun 2018 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi stakeholders kelautan dan perikanan. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa IKU akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem AKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2018 terdapat 9 IKU (Indikator Kinerja Utama) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan Aceh. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh

melaksanakan 8 (delapan) program pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh 8 Unit Kerja Eselon III di lingkup DKP Aceh.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Eselon III dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai.

Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Gubernur melalui Biro Organisasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah oleh masyarakat.

1.3. Tugas dan Fungsi DKP Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Tugas

DKP Aceh adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh.

Dalam melaksanakan tugas tersebut DKP Aceh menyelenggarakan fungsinya :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- f. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan

kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;

- k. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- o. Pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- p. Pembinaan UPTD; dan Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

1.4. Sumber Daya Manusia DKP Aceh

Susunan kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh hingga tahun 2018 sebanyak 347 orang yang terdiri dari 35 orang pejabat struktural dengan persentase 10%, 202 orang staf dengan persentase 58%, 2 (dua) orang pejabat fungsional (1%), dan 106 orang tenaga kontrak dengan persentase 30%. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Rincian Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Struktural	35	10%
2.	Staf	202	58%
3.	Fungsional	2	1%
4.	Tenaga Kontrak	106	30%
	Jumlah	347	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2018

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebanyak 237 orang, terdiri dari golongan IV sebanyak 18 orang, golongan III sebanyak 154 orang, golongan II sebanyak 61 orang, dan golongan I sebanyak 4 orang . Lebih jelasnya jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
IV	18	7%
III	154	65%
II	61	26%
I	4	2%
Jumlah	237	100

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2018

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, secara persentase terlihat bahwa jumlah PNS yang terbesar berada pada golongan III sebesar 65 %, golongan II sebesar 26 %, golongan IV sebesar 7 %, dan yang paling rendah golongan I sebesar 2 %. Pegawai negeri sipil di

lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki persentase tertinggi pada Golongan III sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk menunjang peningkatan golongan ke jenjang yang lebih tinggi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh didukung oleh sejumlah aparatur yang memiliki disiplin ilmu dalam berbagai bidang dan strata pendidikan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Disiplin ilmu sesuai dengan keahlian dan strata pendidikan pada sumber daya manusia penting untuk diperhatikan agar terciptanya kinerja yang efektif, efisien dan berintegrasi. Persentase strata pendidikan pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang terbanyak pada jenjang S1 sebesar 63%, dan yang paling sedikit adalah persentase jenjang S3, D3, SMP dan SD sebesar 1%. Persentase strata pendidikan yang lebih tinggi perlu ditingkatkan lagi untuk menghasilkan Sumber daya manusia yang berkualitas. Rincian jumlah dan persentase pegawai negeri sipil berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3. Rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

Strata Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
S3	1	1%
S2	30	13%
S1	150	63%
D3	3	1%
SMA	48	20%
SMP	2	1%
SD	3	1%
Jumlah	237	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian, DKP Aceh, 2018

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh Potensi

Provinsi Aceh merupakan daerah yang terletak di ujung bagian barat pulau Sumatera yang dikelilingi oleh lautan yaitu Samudera Hindia di wilayah barat-selatan Aceh, serta Selat Malaka dan Perairan Andaman di wilayah Utara-Timur Aceh. Panjang pantai Aceh mencapai 2.666,27 Km dan luas perairan laut Aceh mencapai 295.370 km². Meninjau luasnya wilayah perairan laut Aceh, maka diprediksikan bahwa masih luas wilayah perairan yang belum tereksplorasi sehingga potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh masih besar.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Aceh diperkirakan sebesar 272,7 ribu ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah aceh dan perairan (ZEE). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut baru dimanfaatkan sebesar 208 ribu ton pada tahun 2017 atau baru 76%. Komoditas unggulan yang banyak terdapat di perairan Aceh adalah jenis ikan pelagis besar dan kecil seperti tuna, tongkol, cakalang, tenggiri, kembung, layang, siro, dan tembang; ikan demersal seperti kurisi, bawal putih, gulamah, kuro dan udang; ikan karang seperti kerapu, ekor kuning dan ikan kakap; lobster, kepiting, rajungan dan cumi-cumi juga menghiasi sepanjang perairan Aceh. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Perairan laut Aceh juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Aceh yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (deep sea water) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Selain itu, Aceh juga memiliki potensi perikanan budidaya yang besar, mencapai 55.896 ha (tidak termasuk potensi budidaya laut) yang terdiri dari budidaya payau 50.691,70 ha, dan budidaya air tawar 5.204,3 ha (Aceh Dalam Angka 2016). Pada tahun 2017, produktifitas perikanan budidaya di provinsi Aceh masih sangat rendah. Dimana produktifitas perikanan

budidaya payau (tambak) hanya sebesar 0,74 ton/ha, dan produktifitas perikanan budidaya air tawar hanya 0,67 ton/ha untuk media sawah dan 5,40 ton/ha untuk media kolam.

Potensi rumput laut di Aceh sebenarnya sangat besar. Namun sayang, umumnya rumput laut masih dipandang sebagai tumbuhan liar. tumbuhan algae laut berkualitas unggul tumbuh subur secara liar dan di beberapa wilayah pantai daratan dan kepulauan di Aceh. Apalagi rumput laut sedang booming di pasar internasional, praktis berpeluang besar dan jadi salah satu sektor usaha baru untuk menjawab carut-marutnya perkenomian masyarakat pesisir. Padahal pasar ekspornya cukup besar. Melihat tampilan teluk Pulau Simeulue dan Pulo Aceh, sangat cocok dijadikan daerah budidaya rumput laut, karena berada di laut lepas dengan pantai yang relatif bersih. Bahkan terdapat satu jenis rumput laut yang termasuk langka, yaitu di Lhok Bubon (Aceh Barat). Masyarakat setempat menyebutnya dengan lada laot karena buahnya seperti lada. Pengelolaan dan pemasaran rumput laut ini masih tradisional.

Permasalahan

Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Aceh yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan.

Beberapa wilayah perairan laut Aceh sering terjadi praktik-praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh (WPP 571 dan WPP 572), baik oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Ancaman IUU Fishing dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh belum memadai.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional ($\pm$ 80%). Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai daerah yang memiliki panjang pantai 2.666,27 Km, sudah seharusnya kebutuhan garam daerah dapat dipenuhi dari produksi. Saat ini produksi garam daerah belum dapat memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj DKP Aceh Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis DKP Aceh 2017-2022 dan perjanjian kinerja tahun 2018;

- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan DKP Aceh tahun 2018;
- d. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja DKP Aceh dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2022

VISI PEMERINTAH ACEH

"TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI"

MISI PEMERINTAH ACEH

**Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani;
Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dan budaya ke-Acehan;**

**Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian
berdasarkan MoU Helsinki;**

**Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat
regional, nasional dan internasional;**

**Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial
secara terintegrasi dan berkualitas;**

Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;

Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;

**Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan
industri kreatif yang kompetitif;**

**Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based
planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan;**

**Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan
lingkungan yang berkelanjutan.**

Berdasarkan visi, misi Pemerintah Aceh, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dalam mensukseskan visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dan dibatasi oleh ruang waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan tersebut harus merefleksikan bagaimana visi dan misi pemerintah Aceh yang terkait dengan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat terealisasi dengan baik. Tujuan jangka menengah pelayanan DKP Aceh yang telah dirumuskan yaitu :

- a. Menurunnya angka kemiskinan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui sektor kelautan dan perikanan;
- c. Meningkatkan tatakelola lingkungan hidup lestari.

Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dirumuskan sasaran yang menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga menjadi alat pemicu terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu kepada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RPJMA 2017 – 2022. Adapun sasaran yang terkait dengan tupoksi DKP Aceh yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA 2017-2022) yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan;
- c. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan;

- d. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan;
- e. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah sistematis yang berisikan program-program unggulan untuk mencapai sasaran, strategi juga dapat dijadikan sarana dalam melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi yang yang dicanangkan yaitu :

- a. Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar nelayan;
- b. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
- c. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan;
- d. Mendesain regulasi dan sistem logistik yang baik;
- e. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perikanan;
- f. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautaan dan perikanan;
- g. Penguatan kapasitas budidaya perikanan;
- h. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok;
- i. Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran;
- j. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan;
- k. Peningkatan kualitas kawasan konservasi laut dan pesisir;
- l. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan;
- m. Memberantas pelanggaran IUU Fishing;
- n. Perencanaan zonasi tataruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan. Terdapat 10 (sepuluh) misi pemerintah Aceh yang telah dirumuskan, dan 2 (dua) diantaranya selaras dengan program-program unggulan yang telah dirangkum oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam arah kebijakan. Adapun arah kebijakan tersebut yaitu :

- a. Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
- b. Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan;
- c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
- d. Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan;
- e. Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi perikanan berbasis kawasan;
- f. Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan;
- g. Meningkatkan kemandirian dalam pembudidayaan perikanan;
- h. Membangun kawasan unggulan perikanan;
- i. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan dan tatakelola kesyahbandaran;
- j. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan;
- k. Meningkatkan pengedalian dan rehabilitasi habitat mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
- l. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
- m. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum;
- n. Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Visi Pemerintah Aceh, Misi Pemerintah Aceh, Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI			
MISI 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	1. Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar nelayan 2. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan 3. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan 4. Mendesain regulasi dan sistem logistik yang baik	1. Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan 2. Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4. Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui Sektor Kelautan dan Perikanan	1. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan 2. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perikanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi	1. Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi perikanan berbasis kawasan 2. Membangun sarana dan prasarana

		kelautan dan perikanan 3. Penguatan kapasitas budidaya perikanan 4. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok 5. Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran 6. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan	penunjang produksi perikanan 3. Meningkatkan kemandirian dalam pembudidayaan perikanan 4. Membangun kawasan unggulan perikanan 5. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan dan tatakelola kesyahbandaran 6. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan
--	--	---	--

MISI 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	1. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	1. Peningkatan kualitas kawasan konservasi laut dan pesisir 2. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan 3. Memberantas pelanggaran IUU Fishing 4. Perencanaan zonasi tataruang wilayah pesisir	1. Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi habitat mangrove, terumbu karang dan padang lamun 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum 4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

		dan pulau-pulau kecil	
--	--	-----------------------	--

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, maka Dinas kelautan dan Perikanan Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
- b. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi);
- c. Konsumsi ikan;
- d. Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
- e. Produksi perikanan;
- f. Nilai Ekspor Perikanan;
- g. Luas kawasan konservasi perairan;
- h. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman;
- i. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja DKP Aceh tahun 2018, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja DKP Aceh Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,5
		2	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPI)	98
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	3	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	51,92
3	Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan	4	Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)	4,94
		5	Produksi Perikanan (ton)	294.965,00
			- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	197.132,00
			- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	97.833,00
4	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	6	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	1.142.899,80
5	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	7	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	145.237,77
		8	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	69,67
		9	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	2,57

2.4. Program Instansi

Untuk mencapai kinerja DKP Aceh tahun 2018 tersebut, rencana kerja dilakukan melalui 8 program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Pekantoran;

Program ini bertujuan terlaksananya penyelenggaraan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran terwujudnya tertib administrasi perkantoran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan

kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sasarannya untuk mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

c. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam menjaga kelestarian dan pengawasan lingkungan dari kerusakan yang tidak bertanggungjawab. Dengan sasaran 6. Perairan Aceh bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing.

e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

Program ini bertujuan meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar, Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Payau, Pengembangan Perbenihan Perikanan.

f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Kegiatan Motorisasi Armada Perikanan dalam Upaya Daya Delajah dan Produktivitas Nelayan, Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan, Kegiatan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan.

g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;

Tujuan program adalah meningkatnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah, rata-rata konsumsi ikan per kapita daerah, nilai ekspor hasil perikanan, dan nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Operasional Pusat Jaringan Usaha dan Investasi (PUSJUI) serta Peningkatan Upaya Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan dan Kegiatan Pengembangan Laboratorium Pengujian Mutu Perikanan.

h. Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi.

Tujuan program adalah meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial perencanaan bidang kelautan dan

perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Unit Kerja Eselon III Dinas Kelautan Perikanan Aceh. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja serta seluruh perjanjian kinerja level di bawahnya secara berjenjang, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam pelaksanaannya Target dan realisasi tahunan DKP Aceh berdasarkan perjanjian kinerja pada RPJMA yang disajikan secara ringkas pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018 digambarkan dalam tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Capaian sasaran strategis dan IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2018.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,50	101,87	103,42
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	98,00	92,96	94,86
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	51,92	57,89*	111,50
3	Meningkatkan pembangunan sektor perikanan	Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)	4,94	4,92*	99,60

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Produksi perikanan (ton)	294.965,00	314.045,18	106,47
		Produksi perikanan Tangkap (ton)	197.132,00	212.515,61*	107,80
		Produksi perikanan Budidaya (ton)	97.833,00	101.529,57 *	103,78
		Produksi garam (ton)	15.113,80	17.721,50*	117,25
4	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	1.142.899,80	4.408.162	385,70
5	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	145.237,77	149.228,57**	102,75
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	69,67	77,93	111,85
		Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	2,57	2,64	102,66

Keterangan : *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara

Capaian kinerja secara umum pada tahun 2018 telah menunjukkan capaian sebagaimana yang diharapkan. Dari 5 Sasaran Strategis (SS) terdapat 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan, dari 11 indikator tersebut terdapat 9 yang capaiannya 100% ke atas, yaitu Nilai Tukar Nelayan, konsumsi ikan, produksi perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), produksi garam, nilai ekspor perikanan, luas kawasan konservasi perairan, proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dan rasio kawasan lindung perairan total luas perairan teritorial. Sedangkan indikator

yang capaiannya di bawah 100% yaitu 2 indikator, yaitu Nilai Tukar Pembudidaya ikan dan pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan.

3.2 Analisa dan Evaluasi Kinerja

Analisis capaian kinerja DKP aceh tiap Sasaran Strategis untuk setiap indikator kinerja utama dilakukan untuk menjelaskan kendala dan bentuk dukungan kesuksesannya sesuai pernyataan klaim kinerja, yaitu sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1:

Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Sasaran Strategis meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, memiliki dua IKU (Indikator Kinerja Utama), yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi). Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat Aceh, dalam kaitan ini DKP Aceh senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Nilai Tukar diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan/pembudidaya ikan (Ib). Nilai Tukar menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat digunakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan. Nilai tukar dirumuskan jika lebih dari 100, berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dan sebaliknya, apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual ikannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan, oleh sebab itu Nilai Tukar bisa dipergunakan sebagai indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan.

Apabila dilihat dari capaiannya di tahun 2018, maka capaian Nilai Tukar di atas angka 100 dan telah melampaui target tahun 2018 adalah untuk nelayan sedangkan pembudidaya ikan masih di bawah angka 100 dan masih belum mencapai target tahun 2018, yang antara lain disebabkan harga pakan yang merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%) masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan masih perlu diberikan bantuan pemerintah atau stimulan ekonomi utamanya untuk mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan jumlah produksi dengan harga jual yang menguntungkan atau meningkatkan efisiensi, yang pada ujungnya akan meningkatkan daya beli pembudidaya ikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

1. IKU-1 : Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh.

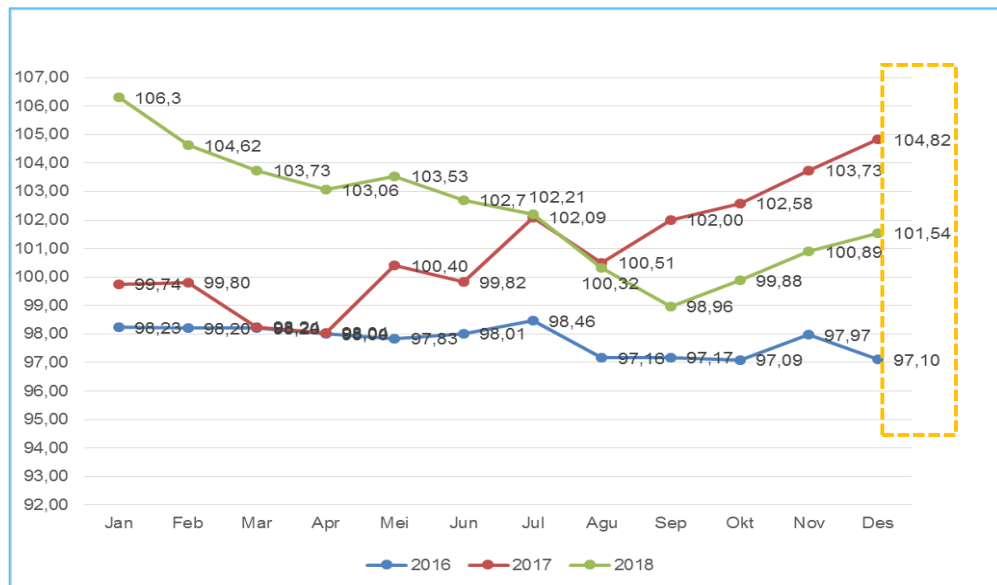
Tabel 3.2. Kinerja rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2018

Sasaran Strategis-1		Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan			
IKU-1		Nilai Tukar Nelayan (NTN)			
REALISASI 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	(\%) CAPAIAN 2018-2022
	TARGET	REALISASI	(\%) CAPAIAN		
100,98	98,50	101,87	103,42	106,00	96,10

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mencapai 101,87 atau tercapai 103,42 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang capaiannya mencapai

100,98, maka capaian tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,87 persen. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 106, maka capaian tahun 2018 baru mencapai sebesar 96,10 persen.

Gambar 3.1. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama tahun 2016-2018



Realisasi NTN selama tiga tahun terakhir dari tahun 2016 – 2018 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2016 nilai NTN sebesar 97,10, pada tahun 2017 naik menjadi 104,82 dan di tahun 2018 realisasinya sebesar 101,54 dengan rata-rata kenaikannya sebesar 0,02% per tahun, walaupun terjadi penurunan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 namun masih di atas angka 100. Realisasi NTN ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima nelayan (harga jual ikan) masih lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang dibayarkan (harga kebutuhan pokok). Keberhasilan pencapaian target NTN merupakan dampak dari kenaikan pendapatan nelayan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang bersamaan, biaya yang harus dibayarkan oleh nelayan cenderung stabil sepanjang tahun, dimana untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar, dan juga tingkat inflasi berpengaruh terhadap meningkatnya capaian NTN.

2. IKU-2 : Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada tahun 2018 terbentuk sebesar 92,96 atau sebesar 94,86 persen dari target. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 103, maka capaian tahun 2018 baru mencapai sebesar 90,25 persen. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2017 yang capaiannya 93,43 Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar 0,47 persen, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel..... berikut.

Tabel 3.3. Kinerja rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) tahun 2018

Sasaran Strategis-1		Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan			
IKU-2		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)			
REALISASI 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
93,43	98,00	92,96	94,86	103,00	90,25

Penurunan ini diakibatkan oleh nilai rata-rata indeks harga biaya operasional produksi pembudidaya ikan (Ib) sepanjang tahun 2018 yang terlalu tinggi yaitu 129,55 terhadap nilai rata-rata indeks harga hasil produksi yang dijual oleh pembudidaya ikan (It) sebesar 120,43.

Kendala dalam pencapaian NTPi diantaranya adalah perhitungan NTPi belum mengakomodir nilai usaha dari pembudidaya ikan hias, benih dan tambak udang dan sampel yang diambil untuk penyusunan NTPi belum menjangkau seluruh kabupaten/kota. Faktor eksternal yang juga mempengaruhi adalah naiknya harga kebutuhan pokok sebagai memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk peningkatan upaya penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan melalui perekayasa teknologi.

Rencana aksi untuk peningkatan NTPi diantaranya adalah : (i) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan bahan baku, penyediaan mesin pellet; (ii) pengembangan teknologi biofloc untuk menekan Food Conversion Ratio/FCR guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya; (iii) melakukan

koordinasi dengan BPS untuk memperluas wilayah survei agar semua kegiatan usaha budidaya bisa terwakili.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Bahan Makanan Protein Ikan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Bahan Makanan Protein Ikan adalah angka konsumsi ikan (kg per kapita), yang merupakan jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan protein ikan. Dalam hal ini, DKP menghitung Angka Konsumsi Ikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dengan komponen yang dihitung mencakup konsumsi dalam rumah tangga (ikan dan udang segar/basah, ikan dan udang awetan, makanan jadi dan kelompok bumbu-bumbuan), konsumsi di luar rumah tangga (konsumsi di restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, dan sekolah), dan konsumsi ikan olahan seperti baso ikan, nugget, somay, pempek, kerupuk ikan, dll.

3. IKU-3 : Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2018 adalah 57,89 kg/kapita, atau naik 11,21% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang besarnya 51,40 kg/kapita. Capaian tahun 2018 telah memenuhi target sebesar 51,92 kg/kapita atau mencapai 111,50% dari target. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra DKP Aceh Tahun 2018-2022, yang besarnya 58,64 kg/kapita, maka capaian tahun 2018 telah mencapai 98,72% dari target tahun 2022.

Tabel 3.4. Capaian angka konsumsi ikan tahun 2018

Sasaran Strategis-2		Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Bahan Makanan Protein Ikan			
IKU-3		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)			
REALISASI 2017	2018			TARGET AKHIR	(%) CAPAIAN 2018-2022
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
51,40	51,92	57,89	111,50	58,64	98,72

Apabila dilihat trend selama periode 2013-2018, perbaikan Angka Konsumsi Ikan di setiap kabupaten/kota menunjukkan ke arah tingkat konsumsi ikan yang tinggi atau > 40,57 kg/kapita. Peningkatan konsumsi ikan dikarenakan kegiatan promosi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dilakukan secara intersif setiap tahun. Gemarikan tersebut merupakan bagian dari Inpres 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), yang didukung oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui festival masak ikan, bazaar ikan, makan tambahan untuk anak sekolah. Selain itu, juga dilakukan peningkatan sarana dan prasarana logistik ikan sehingga ikan dapat terdistribusi dengan baik ke pelosok-pelosok Aceh.

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan untuk meningkatkan Angka Konsumsi Ikan adalah 1). Penyediaan produk perikanan yang bermutu melalui pembinaan dan sertifikasi pada Unit Pengolahan Ikan; 2). Pelaksanaan Gemarikan secara masif disinergikan dengan pelaksanaan Germas, terutama di Kabupaten/Kota yang Angka Konsumsi Ikan-nya masih rendah; 3). Pembangunan sentra kuliner dan Pasar Ikan Bersih bekerjasama dengan Pemerintah Daerah tingkat II dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pemanfaatannya dalam penyediaan anggaran; 4). Pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha yang bergerak pada kegiatan distributor produk perikanan; 5). Penyediaan sarana dan prasarana logistik perikanan.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan

Sasaran strategis ini memiliki 4 Indikator Kinerja Utama yakni (1) Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan, (2) produksi perikanan (tangkap dan budidaya), (3) produksi garam.

4. IKU-4 : Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Strategis Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor Perikanan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa

yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya (dalam persen). PDRB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDRB sub perikanan tahun 2018 adalah sebesar 4,92% atau meningkat 1,83% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tahun 2017 yang besarnya 4,83%. Realisasi pertumbuhan PDRB sub Perikanan tahun 2018 belum melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 4,94% atau hanya tercapai 99,59% dari target. Apabila dibandingkan dengan target Renstra DKP Aceh tahun 2022 sebesar 5,32%, maka pencapaian baru mencapai 92,48%.

Tabel 3.5. Capaian Pertumbuhan PDRB sub Perikanan tahun 2018

Sasaran Strategis-3		Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan			
IKU-4		Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)			
REALISASI 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
4,83	4,94	4,92	99,60	5,32	92,48

Belum tercapainya target tahun 2018 antara lain disebabkan melambatnya laju pertumbuhan produksi perikanan pada tahun 2018, terutama perikanan budidaya yang antara lain dikarenakan faktor cuaca yang ekstrim dan serangan penyakit. Disamping itu, investasi untuk penangkapan ikan yang telah dibuka 100% untuk penanaman modal namun belum mampu menarik investor-investor untuk menanamkan modalnya di Aceh. Sementara itu, Pemerintah telah berupaya melakukan pemberian bantuan benih unggul, pakan dan obat-obatan bagi petani tambak dan kolam, pembukaan lahan baru dan rehabilitasi tambak untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, gerakan pakan mandiri juga dilakukan secara intensif dalam rangka mengurangi biaya produksi sehingga lebih efisien.

5. IKU-5 : Produksi perikanan

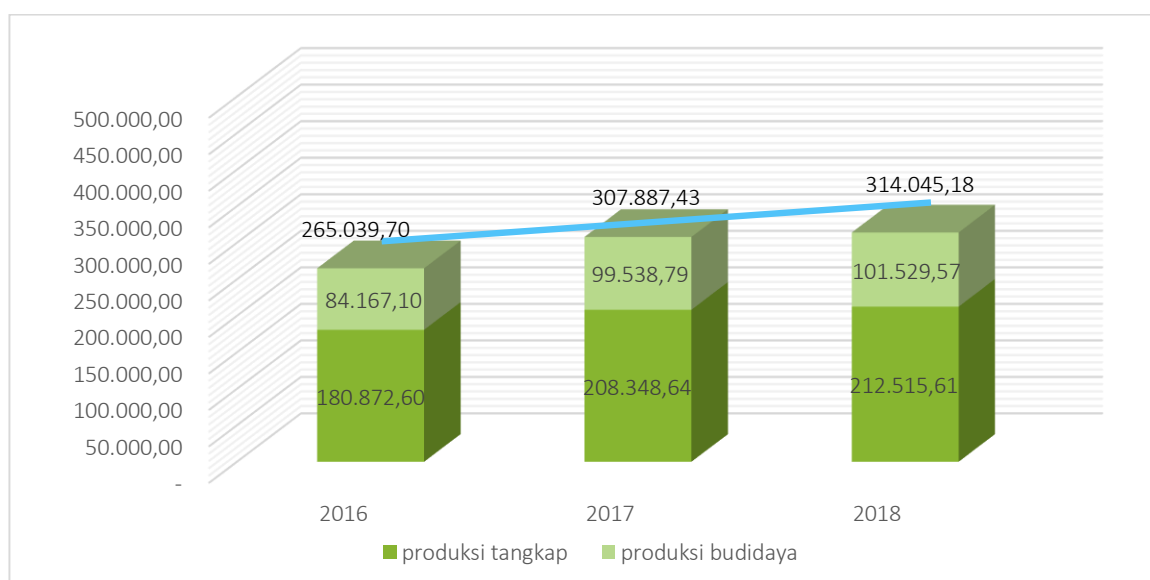
Produksi Perikanan merupakan penjumlahan dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap adalah jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap yang terdiri dari laut dan perairan umum di seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan produksi perikanan budidaya yaitu jumlah hasil produksi perikanan budidaya yang meliputi; perikanan tawar, payau, dan laut.

Jumlah produksi perikanan pada tahun 2018 realisasinya sebesar 314.045,18 ton dari target 294.965,00 ton atau mencapai 106,47%, sedangkan dibandingkan dengan produksi perikanan tahun 2017 sebesar 307.887,43 ton maka terjadi peningkatan sebesar 1,96%, sedangkan terhadap target akhir renstra sebesar 370.250,00 ton maka baru mencapai 84,82%.

Tabel 3.6. Capaian produksi perikanan tahun 2018

Sasaran Strategis-3		Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan			
IKU-5		Produksi perikanan (ton)			
REALISASI 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
307.887,43	294.965,00	314.045,18	106,47	370.250,00	84,82

Gambar 3.2. Produksi perikanan tahun 2016-2018 (ton)



Selama tiga tahun terakhir 2016-2018 produksi perikanan cenderung meningkat dari 265.039,70 ton pada tahun 2016 menjadi 314.045,18 ton pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 17,17%. Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 212.515,61 ton atau 67,67% dari total produksi dan produksi perikanan budidaya 101.529,57 ton atau sebesar 32,33% dari total produksi perikanan.

Kegiatan pendukung keberhasilan pencapaian target produksi perikanan 2018 antara lain 1). peningkatan kualitas pendataan statistik perikanan, diantaranya dengan melakukan bimbingan teknis peningkatan kemampuan petugas statistik perikanan tangkap di daerah. Bimbingan teknis ini ditunjukan bagi petugas pengumpul data/enumerator di kabupaten/kota serta di pelabuhan perikanan tentang metode pengumpulan data statistik perikanan tangkap. 2). Peningkatan kapasitas pelabuhan dengan melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan seperti dermaga, breakwater, ketersediaan air bersih. 3). Pengembangan kawasan budidaya ikan unggulan berbasis mukim yang tersebar di kabupaten/kota dengan cara dilakukan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada pembudidaya ikan dan juga bantuan berupa benih dan pakan, alat produksi pakan dan peningkatan areal budidaya baik yang direvitalisasi maupun dibangun baru.

a. IKU-6 : Produksi perikanan tangkap

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2018 adalah sebesar 212.515,61 ton atau 107,80% dari target sebesar 197.132,00 ton. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap tahun 2017 yang besarnya 208.348,64 ton terdapat kenaikan sebesar 1,96%. Capaian 2018 tersebut adalah sebesar 91,77% dari target akhir Renstra 2017-2022 sebesar 231.568,00 ton.

Tabel 3.7. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2018

Sasaran Strategis-3		Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan			
IKU-6		Produksi perikanan (perikanan tangkap) (ton)			
REALISASI 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
208.348,64	197.132,00	212.515,61	107,80	231.568,00	91,77

Tercapainya produksi perikanan tangkap dari target yang ditetapkan antara lain Peningkatan produksi perikanan tangkap ini selain karena faktor alam, yaitu terjadi peningkatan kelimpahan ikan pada bulan juni dan juli, juga disebabkan karena meningkatnya kapasitas kelompok-kelompok khususnya dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang merupakan hasil dari pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya dan bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelompok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat tangkap jaring gillnet, rumpom laut dalam, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal serta terus meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan melalui program pengembangan perikanan tangkap.

b. IKU-7 : Produksi perikanan budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya tahun 2018 adalah sebesar 101.529,00 ton atau 103,78% dari target sebesar 97.833,00 ton. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan budidaya tahun 2017 yang besarnya 99.538,79 ton terdapat kenaikan sebesar 1,96%. Capaian 2018 tersebut adalah sebesar 73,21% dari target akhir renstra 2017-2022 sebesar 138.682,00 ton.

Tabel 3.8. Capaian produksi perikanan budidaya tahun 2018

Sasaran Strategis-3		Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan			
IKU-7		Produksi perikanan (perikanan budidaya) (ton)			
REALISASI 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
99.538,79	97.833,00	101.529,57	103,78	138.682,00	73,21

Tercapainya produksi perikanan budidaya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1). meningkatnya kapasitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dalam menyediakan benih yang unggul, 2). Pembinaan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan baik proses perbenihan dan pembesaran dengan kegiatan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik

(CBIB), 3). dan juga bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya.

6. IKU-8 : Produksi garam

Produksi garam diperoleh dari garam yang dihasilkan oleh petambak garam rakyat selama panen garam atau musim produksi tahun 2018. Target tahun 2018 adalah 15.113,8 ton. Pendataan jumlah produksi garam berasal dari data produksi garam rakyat Kabupaten/Kota yang mendapatkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat PUGaR (6 Kabupaten/Kota), Non PUGaR (2 Kabupaten/Kota). Metodologi Pendataan Garam disusun oleh DKP Aceh sedangkan Pengumpulan dan Validasi Data dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota. Realisasi hingga akhir masa produksi 2018 menghasilkan 17.620,50 ton tercapai sebesar 117,25% dari target, dibandingkan dengan produksi garam tahun 2017 yang hanya 17.275 ton, produksi garam tahun 2018 naik mencapai 2,52%. Target akhir Renstra 2018-2022 sebesar 43.166,52 ton, maka capaian realisasi produksi garam baru mencapai 41,05%.

Tabel 3.9. Capaian produksi garam tahun 2018

Sasaran Strategis-3		Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan			
IKU-8		Produksi garam (ton)			
REALISASI 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
17.275,00	15.113,80	17.721,50	117,25	43.166,52	41,05

Tercapainya produksi garam disebabkan oleh terus meningkatnya kelas usaha produksi dari pola tradisional menjadi semi intensif dan juga dipengaruhi oleh keberhasilan dan berfungsinya para penyuluh yang ada di daerah dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha garam. Selain itu, keberhasilan capaian produksi garam didukung juga oleh bantuan pemerintah melalui program Aceh Hebat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil seperti pembinaan, revitalisasi lahan produksi garam, rumah tunnel dan alat

pengolahan garam kepada petani garam yang kekurangan modal dalam proses pengembangan usaha garamnya.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatkan neraca perdagangan perikanan

Sasaran strategis ini memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yakni Nilai Ekspor Perikanan (USD).

7. IKU-9 : Nilai Ekspor Perikanan (USD)

Nilai ekspor perikanan merupakan jumlah komoditas produk perikanan dalam US Dolar yang diekspor baik melalui pelabuhan di provinsi Aceh maupun di luar Aceh, berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Capaian nilai ekspor hasil perikanan tahun 2018 adalah USD 4.408.162 juta (data sementara BPS per Desember 2018), atau naik 9,54% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang besarnya USD 3.987.649 juta. Capaian tahun 2018 telah melampaui target sebesar USD 1.142.899,8 juta (target yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018) atau mencapai 385,70% dari target. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra DKP Aceh Tahun 2017-2022, yang besarnya USD 4.552.000 juta, maka capaian tahun 2018 telah mencapai 96,84% dari target 2022.

Tabel 3.10. Capaian nilai ekspor perikanan tahun 2018

Sasaran Strategis-4		<i>Meningkatkan neraca perdagangan perikanan</i>			
IKU-9		Nilai ekspor perikanan (USD)			
REALISASI 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
3.987.649,00	1.142.899,80	4.408.162,00	385,70	4.552.000,00	96,84

Berdasarkan tempat ekspor perikanan dapat dibagi dua yaitu 1). Ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Aceh dengan nilai mencapai USD. 384.868; 2). Ekspor melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh mencapai USD. 4.023.294.

Terjadinya peningkatan nilai ekspor perikanan aceh tidak terlepas dari berlimpahnya hasil tangkapan seperti ikan tuna, tongkol dan cakalang pada bulan maret-juli 2018 dan terjadi peningkatan produksi yang signifikan pada hasil pembudidayaan udang khususnya vaname yang dibudidayakan secara intensif. Selain itu, pemerintah juga turut andil dalam meningkatkan ekspor perikanan dengan dilakukan melalui program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan seperti pelatihan peningkatan mutu produk perikanan seperti penerapan sistem rantai dingin bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha logistik/distributor, bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana pengolahan ikan.

Sasaran Strategis 5:

Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

Sasaran strategis ini memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yakni (i) Luas kawasan konservasi perairan (ha), (ii) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%), (iii) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%).

8. IKU-10 : Luas kawasan konservasi perairan

Jumlah luas kawasan konservasi perairan adalah inventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi baru yang telah dicadangkan melalui SK Menteri, SK Kepala Daerah tingkat I maupun Tingkat II dan menambahkan luasan kawasan konservasi tersebut ke dalam data base capaian kumulatif kawasan konservasi perairan yang ada dalam data base kawasan konservasi perairan. Sehingga penghitungannya dilakukan dengan menjumlahkan luas kawasan konservasi tahun 2017 dan luas kawasan konservasi baru pada tahun 2018. Target luas kawasan konservasi pada tahun 2018 sejumlah 145.237,77 ha dan target akhir renstra tahun 2022 adalah 281.100 ha, target luas kawasan konservasi mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan target tahun 2016 (68.442,81 ha) dan tahun 2017

(77.856,66 ha), dengan realisasi sebesar 149.228,57 ha atau sebesar 102,75% dari target di tahun 2018.

Tabel 3.11. Capaian luas kawasan konservasi perairan tahun 2018

Sasaran Strategis-4		<i>Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir</i>			
IKU-10		Luas kawasan konservasi perairan (ha)			
REALISASI 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
77.856,66	145.237,77	149.228,57	102,75	281.100,00	53,09

Pencapaian kinerja ini merupakan akumulasi luas kawasan Konservasi dari tahun sebelumnya di tambahkan dengan penambahan luas kawasan Konservasi perairan yang dicadangkan pada tahun 2018 sebesar 71.371,91 ha. Penambahan kawasan yang dicadangkan berada pada Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Aceh Tamiang.

Kegiatan pendukung keberhasilan pencapaian target 2018 adalah Identifikasi Potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan dan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholders terkait seperti akademisi, NGO, masyarakat, pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan luasan kawasan Konservasi perairan di Aceh mencapai target 281 ribu Ha.

9. IKU-11 : Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
Proporsi tangkapan ikan yang berda dalam batasan biologis yang aman merupakan persentase tangkapan ikan yang masih aman di bawah angka Maximum Sustainable Yield (MSY) Aceh yaitu 272.707 ton.

Tabel 3.12. Persentase tangkapan ikan terhadap MSY Aceh tahun 2016-2018

TAHUN	2016	2017	2018
Produksi Tangkap (ton)	180.873	208.349	212.516
% terhadap MSY Aceh	66,32	76,40	77,93

Pada tahun 2018 jumlah tangkapan ikan aceh mencapai 212.515,61 ton atau 77,93% dari angka MSY Aceh, dengan jumlah produksi tersebut maka penangkapan ikan di laut Aceh masih dianggap aman, namun dilihat dalam tiga tahun terakhir proporsi tangkapan ikan mengalami peningkatan dari angka 66,32% pada tahun 2016 menjadi 77,93% pada tahun 2018.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menangani keberlangsungan ikan yang aman yaitu dengan melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga terjaganya kelestarian ikan di wilayah penangkapan WPP 571 dan WPP 572. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan ikan konsumsi dilakukan peningkatan produksi dari hasil budidaya payau, tawar maupun laut.

10. IKU-12 : Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Rasio kawasan lindung terhadap total luas perairan teritorial adalah perbandingan antara luas kawasan yang dilindungi terhadap luas suatu wilayah yang dinyatakan dalam persentase. Kawasan yang dilindungi meliputi luas padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alam yang terkait, dikelola secara resmi dan efektif.

Pada tahun 2018 rasio kawasan lindung perairan Aceh mencapai 2,64% atau 149,229 ha dari total luas teritorial Aceh sebesar 5.656.300 Ha dan telah melampaui target tahun 2018 sebesar 2,57% atau 102,66%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, luas kawasan konservasi perairan meningkat sebesar 71.372 ha dengan rasio sebesar 1,26%.

Tabel 3.13. Rasio luas kawasan konservasi terhadap perairan teritorial 2017-2018

TAHUN	2017	2018
Kawasan konservasi perairan (ha)	77.857	149.229
Rasio Luas kawasan terhadap perairan teritorial (%)	1,38	2,64

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan untuk meningkatkan kawasan konservasi antara lain percepatan penyusunan SK Gubernur Aceh tentang penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan Aceh, melakukan sosialisasi kawasan konservasi bagi masyarakat perikanan dan penanaman mangrove.

3.3 Kinerja Keuangan

APBA DKP tahun 2016 sampai 2018 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap eselon III lingkup DKP Aceh, baik yang dilaksanakan oleh Dinas, maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Alokasi anggaran tahun 2018 digunakan untuk pembiayaan rutin (belanja pegawai dan operasional perkantoran) sebesar 10%, belanja untuk stakeholder langsung sebesar 90%. Perkembangan pagu dan realisasi DKP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14. Pagu dan realisasi anggaran DKP Aceh tahun 2016 – 2018

TAHUN	2016	2017	2018
Pagu Anggaran (Rp.)	296.013.708.792	296.517.235.403	332.118.468.193
Realisasi Anggaran (Rp.)	273.442.448.110	263.316.842.585	208.154.901.876
(%)	92,37	88,80	62,67

Berdasarkan tabel di atas pagu anggaran DKP Aceh sebesar Rp. 332.118.468.193,- atau naik 10,72% dari pagu alokasi anggaran tahun 2017 sedangkan realisasi tahun 2018 mencapai Rp. 208.154.901.876,- atau hanya 62,67%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi anggaran terjadi penurunan sebesar 26,13%.

Realisasi anggaran tahun 2018, yang hanya mencapai 62,67% maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 123.963.566.317,-. Sisa anggaran tersebut sebagian besar adalah karena adanya :

- a. Beberapa kegiatan pada 2 unit kerja Eselon III (bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya) sebesar Rp. 98.824.227.648,- yang merupakan kegiatan yang tidak dapat dilelang dan diselesaikan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran (kegiatan putus kontrak);
- b. Selain itu, juga terdapat sisa tender.

Tabel 3.15. Pagu dan realisasi anggaran DKP Aceh per program tahun 2018

PROGRAM	TAHUN 2018		
	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
Belanja Tidak Langsung	24.531.938.052	22.503.617.909	91,73
Belanja Langsung	307.586.530.141	185.651.283.967	60,36
Program Pelayanan Administrasi Pekantoran	6.535.838.700	5.818.466.055	89,02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.286.610.000	1.070.724.112	46,83
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	4.474.734.969	3.750.753.576	83,82
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	4.380.325.000	2.885.595.754	65,88
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	107.437.373.199	92.809.749.945	86,38
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	175.033.759.773	73.256.381.191	41,85
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	4.037.188.500	3.733.946.056	92,49
Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi	3.400.700.000	2.325.667.278	68,39
Jumlah	332.118.468.193	208.154.901.876	62,67

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran diantaranya: pengesahan anggaran belanja yang masih terlambat, proses pengadaan barang dan jasa masih terjadi banyaknya gagal lelang sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kontrak, adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, seperti banjir, cuaca buruk, kesulitan tenaga kerja, dll.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan realisasi anggaran diantaranya :

- 1). Melakukan evaluasi atas pelaksanaan prioritas/otsus, penyerapan anggaran dan capaian kinerjanya, 2). Meminta surat kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan

pekerjaan tepat waktu, 3). Memastikan seluruh pekerjaan dibayarkan sesuai dengan % penyelesaian fisiknya, 4). Melakukan pengendalian terhadap penyelesaian barang yang diserahkan kepada masyarakat atau Bantuan Pemerintah telah sesuai ketentuan dan dilengkapi dengan BAST, 5). Memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai ketentuan.

BAB 4

PENUTUP

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, Gubernur Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2018, DKP Aceh telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai sesuai target.

Beberapa IKU yang belum dapat mencapai target, lebih disebabkan adanya kendala teknis dan pengaruh faktor alam, serta kondisi perekonomian global. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, melalui penajaman program dengan mengedepankan aspek keberpihakan dan pemerataan antar wilayah. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

- a. peningkatan tata kelola bantuan Pemerintah;
- b. peningkatan mutu dan pengembangan sistem rantai dingin;
- c. penguatan kapasitas SDM dan inovasi teknologi;
- d. perluasan akses pasar, promosi, investasi dan permodalan usaha;
- e. meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya payau, dengan meningkatkan bantuan agroinput benih ikan unggulan dan pakan;
- f. pembangunan sentra kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ekonomi lokal, peningkatan produksi untuk ketahanan pangan, dan ekspor hasil perikanan;

- g. penataan ruang laut dan konservasi;
- h. meningkatkan produksi perikanan tangkap dengan meningkatkan bantuan boat/perahu dan alat bantu penangkapan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH


PANCACITA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CUT YUSMINAR, A.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc**
Jabatan : **GOVERNUR ACEH**

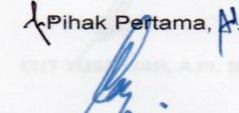
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2018

Pihak Kedua, 
drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc

Pihak Pertama, 
CUT YUSMINAR, A.Pi, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH**

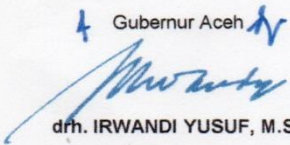
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	- Nilai Tukar Nelayan (NTN) - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98,50 98,00
2.	Meningkatnya ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makana protein ikan	- Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	51,92 (kg/kapita/tahun)
3.	Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan	- Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan - Produksi Perikanan Tangkap - Produksi Perikanan Budidaya - Produksi Garam	4,94% 197.132 ton 97.833 ton 15.113,80 ton
4.	Meningkatnya neraca perdagangan perikanan	- Nilai Ekspor Perikanan	1.142.899,80 US\$
5.	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	- Luasan kawasan konservasi perairan - Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman - Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luasan perairan teritorial	145.237,77 ha 69,67% 2,57%

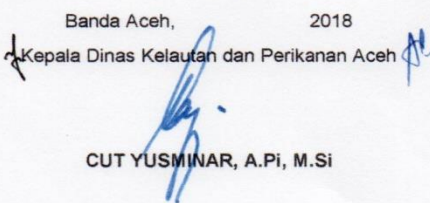
Program

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
6. Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi

Anggaran

Rp 4.474.734.969
Rp 4.380.325.000
Rp 107.437.373.199
Rp 175.033.759.773
Rp 4.037.188.500
Rp 3.400.700.000

Gubernur Aceh

drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc

Banda Aceh, 2018
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

CUT YUSMINAR, A.Pi, M.Si

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018			
			Target	Realisasi		%
1	Meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,50	101,87		103,42
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	98,00	92,96		94,86
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	51,92	57,89 *		111,50
3	Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)	4,94	4,92 **		99,60
		Produksi Perikanan (ton)	294.965,00	314.045,18 *		106,47
		- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	197.132,00	212.515,61 *		107,80
		- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	97.833,00	101.529,57 *		103,78
		Produksi Garam (ton)	15.113,80	17.721,50 *		117,25
4	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	1.142.899,80	4.408.162		385,70
5	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	145.237,77	149.228,57 *		102,75
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	69,67	77,93		111,85
		Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	2,57	2,64		102,66